

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	Persentase	68,22	68,22*	68,22*	100
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah	Persentase	47,73	47,73*	47,73*	100
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Persentase	85	20	20	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	Persentase	85	20	20	100
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,68**	100

IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Persentase	92	20	20	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

**berdasarkan hasil survey pada TW II

Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Literasi Keuangan Konvensional
2. Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional

Latar Belakang

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Untuk mengukur tingkat literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 68,22%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian Tingkat literasi keuangan konvensional akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada Akhir Tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan I belum dapat diketahui, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	Persentase	68,22	68,22*	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)
2.	Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan I beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas
 - Rapat Persiapan Penyusunan Bahan Laporan SNKI Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2026 (Pokja II, Sekretariat DNKI), 7 Januari 2026 (Pokja I dan III), 9 Januari 2026 (Pokja VI dan VII), 13 Januari 2026 (Pokja IV dan V).
 - Rapat Koordinasi Persiapan Peluncuran Asesmen Program Edukasi dan Literasi Keuangan Digital sesuai Kerangka Core Competencies di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2026.
 - Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada tanggal 19 Januari 2026.
 - Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut FGD Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat (PINTAR) dengan OJK pada tanggal 5 Februari 2026.
 - Weekly Meeting PINTAR pada tanggal 20 Februari 2026.
 - Rapat Penyusunan Laporan SNKI Tahun 2025 pada tanggal 23 Februari 2026.
 - Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" pada tanggal 2 Maret 2026.
 - Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada tanggal 13 Maret 2026.
2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional
 - FGD Program PINTAR bersama Wakil Bupati Kuningan dan jajaran OPD Kab. Kuningan pada tanggal 13 Januari 2026.
 - FGD Program PINTAR pada tanggal 26 Februari 2026.
 - Kegiatan Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (Aksi KLIK) pada tanggal 6 Maret 2026.
 - FGD Peran BPKN dalam Perlindungan Konsumen untuk mendukung inklusi keuangan pada tanggal 11 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti

perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menysasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal, serta penguatan DNKI menjadi DNKK.

1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Latar Belakang

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 47,73%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian tingkat literasi keuangan syariah akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan SNLIK baru dilakukan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada Akhir Tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan belum dapat diketahui, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah	Persentase	47,73	47,73*	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan syariah yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan syariah dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan syariah, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan syariah dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan syariah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen prioritas	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)
2.	Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan I beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen prioritas
 - Rapat Pembahasan Edukasi Keuangan Syariah pada tanggal 26 Januari 2026.
 - Rapat Persiapan Sosialisasi Edukasi Keuangan Syariah bagi Warga Muhammadiyah Tahun 2026 tanggal 2 Maret 2026.
 - Rapat pembahasan keberlanjutan program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro binaan SABUK KAJ dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026.
2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah
 - Focus Group Discussion (FGD) Lanjutan Gerakan LENTERA Emas pada tanggal 13 Januari 2026.
 - Sosialisasi "Keuangan Digital Bagi Jaringan Masjid dan Mushola" tanggal 15 Januari 2026.

- FGD Pemantauan Implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 Semester II-2025 tanggal 6 Februari 2026.
- ToT Pendamping Halal SABUK KAJ pada tanggal 7 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; serta penguatan DNKI menjadi DNKK.

2

Sasaran Kegiatan 2. *Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 2: *Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas* yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Untuk mengukur Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan dilakukan melalui perhitungan realisasi tahapan pertama, yaitu nilai tahapan pertama = (jumlah dokumen yang dihasilkan/jumlah dokumen yang ditargetkan) * 20%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan hingga Triwulan I Tahun 2026, berjalan sesuai *timeline* yang ditetapkan. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 23,52% dari target tahun 2026 serta 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Persentase	85	20	100

Dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan, sebagaimana amanat UU P2SK Pasal 226, dan menindaklanjuti arahan presiden bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta

memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya agar dibetuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait: - Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital - Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, - Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil - Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan I beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026.
2. Rapat Teknis Pembentukan DNKK bersama TBI dan MSC pada tanggal 12 Januari 2026.
3. Rapat Program Kerja Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Pokja 1) pada tanggal 29 Januari 2026.
4. Acara Pembahasan Legal Drafting Kelembagaan DNKK – Bali pada tanggal 12-13 Februari 2026.
5. Audiensi dengan Kemenkum terkait RPP DNKK pada tanggal 3 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi

penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Namun, berdasarkan arahan presiden agar dibentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI. Hal ini dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya. Hal ini berdampak pada proses penyusunan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait perubahan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah. Proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah hingga Triwulan I Tahun 2026, berjalan sesuai *timeline* yang ditetapkan. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi,

Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 23,52% dari target tahun 2026 serta 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	Persentase	85	20	100

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tangguh dan kompetitif. Pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI), dan regulator perlu memberikan arah kebijakan yang jelas dan kondusif. Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peran akademisi dan komunitas menjadi penting dalam menyebarkan literasi dan edukasi keuangan syariah secara lebih masif.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait: - Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital - Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen,	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW I (rincian terlampir)

	- Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil - Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan		
--	---	--	--

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan I beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026.
2. Rapat Pembahasan Edukasi Keuangan Syariah pada tanggal 26 Januari 2026.
3. FGD Pemantauan Implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 Semester II-2025 tanggal 6 Februari 2026.
4. Rapat pembahasan keberlanjutan program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro binaan SABUK KAJ dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah. Namun, berdasarkan arahan presiden agar dibentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI. Hal ini dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya. Hal ini berdampak pada proses penyusunan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi

penyelenggaraan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait perubahan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Adapun pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas tahun 2026 dilakukan dengan survei kepuasan layanan yang dilakukan tiap semesternya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 berupa skala sebesar 3 dari 4 (baik), penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan kepada para Kementerian/Lembaga/Mitra terkait.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan belum dapat diketahui realisasi kinerjanya karena penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir triwulan II dan triwulan IV. Namun jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada triwulan I 2026, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target triwulan I dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Indeks	3 dari 4	3,68*	100%
--	--------	----------	-------	------

*) Angka target semesteran (Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan tiap semesternya sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir triwulan II)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Terlaksana	Telah dilakukan serangkaian persiapan dalam mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 20% dengan target capaian telah tersusunnya beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 21,74% dari target Tahun 2026 sebesar 92% target Tahun 2026 sebesar dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	Persentase	92	20	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi yang telah ditetapkan. Adapun telah dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pencapaian Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Manual IKU level eselon II.
2. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen laporan kinerja triwulanan level eselon II melalui Ekon-Go.
3. Telah dilakukan penyampaian data monitoring capaian Rincian Output Prioritas Nasional triwulanan.
4. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan.

Sampai dengan akhir triwulan I Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan I, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dokumen PK, Manual IKU dan Rencana

			Aksi yang proporsional
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan	Terlaksana	Telah dilakukan pengelolaan data kinerja melalui Ekon-Go
3.	Penyusunan Renja 2026	Ditunda dan Digeser	Penyusunan akan segera dilakukan
4.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala sesuai target yang telah ditetapkan
5.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring implementasi penggunaan Srikandi dalam persuratan di unit keasdepan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan.

Jakarta, 31 Maret 2026

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan



ERDIRIYO